

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra (2007). *Akuntansi untuk LSM dan Parpol*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Bastian, Indra (2007). *Akuntansi untuk Yayasan dan Lembaga Publik*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Deddi, Nordiawan (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, (2013). *Profil Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat*. Pontianak LAKIP Dinas Kehutanan.
- Indonesia (2005). *Peraturan Pemerintah Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. PP Nomor 24 Tahun 2005. TLN No.4503.
- Indonesia (2010). *Peraturan Pemerintah Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. PP Nomor 71 Tahun 2010. TLN No.5165.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun (2005) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan* : Jakarta. Salemba Empat.
- Mardiasmo (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Meliala, Tulis, S. dkk. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Semesta Media. Edisi Ketiga.
- Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.*
- Paparan-Paparan Kementerian PAN & RB terkait IKU.*
- Tasya Vitara, (2014). *Hubungan Penerapan PSAP nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Dengan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Provinsi Kalimantan Barat)*. Pontianak. Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura.
- Tita Djuitaningsih, (2011). *Hubungan Penerapan PSAP Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Dengan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Pemerintahan Kota Tangerang Selatan)*. Tangerang. Dosen Tetap Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Bakrie.